

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

Wiwik Setiawati* · Muhammad Amir Masruhim²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Indonesia

*Email: swiwik631@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-10-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 31-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2>

Kata Kunci

Penugasan kepala sekolah;
O, E, A;
Analisis kebijakan;
Kepemimpinan sekolah;
Kalimantan Timur.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika regulasi penugasan guru sebagai kepala sekolah pada periode 2018–2025, dengan fokus pada Permendikbud No. 6/2018, Permendikbudristek No. 40/2021, dan Permendikdasmen No. 7/2025, serta implikasinya bagi kepemimpinan sekolah, profesionalisme, dan kinerja guru di Provinsi Kalimantan Timur. Kajian bertujuan (i) memetakan asumsi ontologis, perangkat epistemologis, dan orientasi aksiologis (O, E, A) yang melekat pada teks kebijakan, serta (ii) merumuskan rancangan penelitian empiris untuk menguji perbedaan dan pengaruh implementasi antarrezim regulasi. Metode tahap awal menggunakan analisis dokumen kebijakan melalui identifikasi unit pasal, pengodean tematik berbasis O, E, A, dan penyusunan matriks pemetaan instrumen kebijakan, diperkuat dengan ilustrasi konteks urban dan rural/terpencil sebagai dasar kontrol variabel konteks. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa secara ontologis regulasi membakukan kriteria kelayakan dan kompetensi yang memposisikan kepala sekolah pada spektrum administrator, pemimpin pembelajaran, dan aktor penjaminan mutu. Secara epistemologis, penekanan pada sertifikat, portofolio, dan laporan memperkuat logika bukti yang dapat diaudit sehingga berpotensi menggeser perhatian dari kualitas praktik kepemimpinan dan pembelajaran yang tidak selalu terdokumentasi. Secara aksiologis, nilai mutu dan akuntabilitas dapat berubah menjadi kontrol administratif bila tidak diimbangi pembinaan dan penguatan kapasitas, terutama pada sekolah dengan keterbatasan akses dan sumber daya. Temuan konseptual merumuskan tiga jalur dampak kebijakan kapasitas, akuntabilitas, dan dukungan sistem yang diperkirakan memengaruhi profesionalisme dan kinerja guru melalui mediasi kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian lanjutan diusulkan menggunakan paradigma post-positivistik dengan survei komparatif cross-sectional, sampling stratified cluster, instrumen Likert bagi kepala sekolah dan guru, verifikasi dokumen, serta wawancara tersemat. Analisis dirancang menggunakan uji perbedaan antar kelompok dan pemodelan pengaruh serta mediasi, dengan opsi SEM-PLS apabila ukuran sampel memadai.

ABSTRACT

Keywords
Principal Assignment;
O E A;
Policy Analysis;
School Leadership;
East Kalimantan.

This article examines the dynamics of regulations governing the assignment of teachers as school principals during 2018–2025, focusing on Permendikbud No. 6/2018, Permendikbudristek No. 40/2021, and Permendikdasmen No. 7/2025, and their implications for school leadership, teacher professionalism, and teacher performance in East Kalimantan Province, Indonesia. The study aims to (i) map the ontological, epistemological, and axiological (O E A) assumptions embedded in the policy texts and (ii) formulate an empirical research design to test differences and effects of implementation across regulatory regimes. The initial phase employs policy document analysis through article-level unit identification, O E A based thematic coding, and the construction of a mapping matrix of policy instruments, strengthened by anonymized urban and rural/remote contextual illustrations to justify the inclusion of contextual control variables. The mapping indicates that, ontologically, the regulations formalize eligibility criteria and essential competencies, positioning principals along a spectrum from administrative managers to instructional leaders and quality assurance actors. Epistemologically, the emphasis on certificates, portfolios, and reports reinforces an audit-oriented evidence logic that may shift attention away from leadership and instructional practices that are not consistently captured in documentation. Axiologically, the policy values of quality improvement and accountability may drift toward administrative control when not balanced by capacity building and professional support, particularly in schools facing limited access and resources. The conceptual synthesis identifies three policy impact pathways capacity, accountability, and system support through which implementation is expected to influence teacher professionalism and performance, with principal leadership operating as a mediating mechanism. The proposed empirical study adopts a post-positivist paradigm with a comparative cross-sectional survey, stratified cluster sampling, Likert scale instruments for principals and teachers, document verification, and embedded semi-structured interviews. Analyses are planned using between group difference tests and modeling of direct and mediated effects, with SEM PLS as an optional approach when sample size requirements are met.

PENDAHULUAN

Penugasan guru sebagai kepala sekolah merupakan instrumen kebijakan strategis yang menentukan arah kepemimpinan sekolah, tata kelola mutu, dan kualitas layanan pembelajaran (Salehudin et al., 2024). Dalam praktiknya, kepala sekolah berperan sebagai penggerak organisasi pembelajaran sekaligus penjamin berlangsungnya proses manajerial yang akuntabel (Suhelayanti et al., 2023). Peran tersebut menempatkan regulasi penugasan kepala sekolah sebagai determinan penting bagi konsistensi implementasi program peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan (Cendana et al., 2025). Oleh karena itu, perubahan regulasi penugasan kepala sekolah tidak dapat dipahami semata sebagai pembaruan prosedur administratif (Subakti, Simarmata, et al., 2022). Perubahan regulasi perlu dibaca

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

sebagai perubahan kerangka institusional yang membentuk perilaku aktor, mekanisme akuntabilitas, dan prioritas pengembangan sekolah (Efendi et al., 2022).

Pada periode 2018–2025, pemerintah menerbitkan serangkaian regulasi yang mengatur penyiapan calon kepala sekolah, mekanisme penugasan, masa tugas, pemberhentian, serta penjaminan mutu. Permendikbud No. 6 Tahun 2018 menegaskan tahapan pengusulan, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagai basis penyiapan kepemimpinan. Regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 yang memperbarui ketentuan penugasan dan penyiapan kepala sekolah. Selanjutnya, Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 memperluas pengaturan pada aspek penyediaan calon, mekanisme dan masa penugasan, pemberhentian, serta penjaminan mutu. Rangkaian perubahan ini menunjukkan dinamika orientasi kebijakan yang berimplikasi pada cara sekolah dikelola dan bagaimana kepemimpinan dinilai (Subakti et al., 2025).

Bagi Provinsi Kalimantan Timur, dinamika regulasi tersebut memiliki konsekuensi implementatif yang kuat karena keragaman konteks satuan pendidikan. Variasi geografis dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil memengaruhi akses terhadap program penyiapan, pembinaan, dan evaluasi penugasan kepala sekolah. Perbedaan jenjang layanan pendidikan, termasuk PAUD hingga SLB, menambah kompleksitas kebutuhan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya (Ngaisah et al., 2023). Pada saat yang sama, kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan tenaga pendidik turut menentukan kapasitas sekolah untuk memenuhi tuntutan kebijakan (Umurohmi et al., 2024). Dengan demikian, kebijakan penugasan kepala sekolah di Kalimantan Timur berpotensi menghasilkan variasi praktik yang signifikan antarwilayah dan antarsatuan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan penugasan kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga menentukan orientasi kepemimpinan di sekolah (Nashir, 2024). Orientasi kepemimpinan dapat cenderung menekankan kepatuhan administratif, penguatan pembelajaran, atau kombinasi keduanya, tergantung pada desain instrumen kebijakan dan mekanisme evaluasi (S. Purba et al., 2022). Ketika penilaian kinerja lebih menonjolkan bukti dokumen, praktik kepemimpinan dapat bergeser menjadi berbasis kepatuhan dan pelaporan (Sitompul et al., 2023). Sebaliknya, ketika instrumen kebijakan mendorong supervisi akademik dan pengembangan kapasitas, kepemimpinan cenderung menguat pada dimensi pembelajaran (Utami et al., 2022). Oleh sebab itu, penting menelaah bagaimana perubahan regulasi berpotensi memengaruhi pola manajemen kepemimpinan dan iklim kerja profesional di sekolah (Cecep et al., 2021).

Namun, kajian kebijakan penugasan kepala sekolah sering kali berhenti pada evaluasi teknis seperti kepatuhan prosedural dan capaian indikator program (Ramadhani et al., 2021). Pendekatan teknis cenderung mengabaikan dimensi filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi kebijakan (Zamroni, 2022). Ontologi menjelaskan bagaimana regulasi mendefinisikan hakikat kepala sekolah, guru, dan mutu sekolah sebagai objek yang diatur (Wahyudin & Anggaira, 2021). Epistemologi menelaah cara pengetahuan tentang kompetensi dan

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

kinerja diproduksi, divalidasi, serta dijadikan dasar keputusan penugasan (Setiawan et al., 2023). Aksiologi mengkaji nilai, tujuan, dan etika yang dipertaruhkan agar akuntabilitas tidak mereduksi martabat profesi pendidikan (Setiawan et al., 2023).

Secara ontologis, regulasi penugasan kepala sekolah mengandaikan model sekolah dan model aktor pendidikan tertentu (Salamun et al., 2023). Sekolah dapat diposisikan sebagai organisasi birokratis yang menekankan struktur dan pelaporan atau sebagai komunitas pembelajaran yang menekankan kolaborasi dan pengembangan kapasitas (A. Purba et al., 2022). Kepala sekolah dapat dipahami sebagai administrator, pemimpin pembelajaran, pemimpin transformasional, maupun aktor penjaminan mutu, dan penekanan regulasi berpotensi menguatkan salah satu peran tersebut (Kholifah et al., 2023). Guru juga tidak semata pelaksana kurikulum, melainkan profesional publik yang membawa kompetensi, otonomi bertanggung jawab, serta komitmen etik terhadap peserta didik (S. Purba et al., 2022). Karena itu, tekanan administratif yang berlebihan berisiko mendorong reduksi peran guru menjadi pemenuhan dokumen alih-alih peningkatan kualitas praktik pedagogis (Kholifah et al., 2024).

Secara epistemologis, perubahan kebijakan cenderung mendorong penggunaan indikator dan dokumen yang mudah diverifikasi sebagai bukti kinerja (Idham et al., 2025). Pola ini membentuk apa yang dapat disebut sebagai epistemologi audit, yaitu kebenaran tentang mutu ditetapkan melalui apa yang dapat dilaporkan, dibandingkan, dan diaudit. Di sisi lain, praktik pendidikan menghasilkan pengetahuan praktis-reflektif yang penting tetapi tidak selalu dapat direduksi menjadi indikator kuantitatif (R. A. Purba et al., 2024). Ketegangan antara bukti administratif dan bukti kontekstual berimplikasi pada desain penelitian, terutama pada pemilihan instrumen dan validitas pengukuran (Zainuri, Subakti, Tawakkal, et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian yang hanya mengandalkan indikator administratif berisiko menghasilkan simpulan yang bias terhadap realitas kepemimpinan dan pembelajaran di sekolah (Mubarak et al., 2024).

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini memosisikan Permendikbud No. 6/2018, Permendikbudristek No. 40/2021, dan Permendikdasmen No. 7/2025 sebagai rezim kebijakan yang membawa rasionalitas dan mekanisme berbeda. Fokus utama kajian diarahkan pada pemetaan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis ketiga regulasi sebagai fondasi konseptual penelitian. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara komparatif bagaimana implementasi ketiga regulasi diperkirakan memengaruhi manajemen kepemimpinan kepala sekolah serta profesionalisme dan kinerja guru di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memastikan ketepatan inferensi, penelitian juga merancang kerangka konseptual dan metodologi yang mampu menguji pengaruh dan perbedaan implementasi kebijakan secara ilmiah serta peka terhadap konteks lokal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada penguatan kajian manajemen pendidikan yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga berorientasi mutu, adil konteks, dan berkeadaban.

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik dengan pendekatan kuantitatif komparatif untuk menguji perbedaan dan pengaruh implementasi regulasi penugasan kepala sekolah terhadap kepemimpinan, profesionalisme, dan kinerja guru (Sudarmanto et al., 2022). Paradigma post-positivistik dipilih karena penelitian mengasumsikan realitas sosial dapat didekati melalui pengukuran indikator terstruktur, namun tetap mengakui adanya keterbatasan pengukuran dan potensi bias. Konsekuensinya, desain penelitian menuntut prosedur pengendalian bias, pengujian validitas, serta verifikasi temuan melalui sumber data yang saling melengkapi (Pakpahan et al., 2022). Untuk menjaga kejelasan mekanisme kebijakan di lapangan, penelitian ini menambahkan wawancara terbatas sebagai komponen kualitatif tersemat (*embedded qualitative*). Secara konseptual, kerangka ontologi, epistemologi, aksiologi menjadi landasan untuk memastikan konstruk terukur, prosedur pembuktian statistik, dan pertimbangan etika kontekstual berjalan secara konsisten.

Desain penelitian yang digunakan adalah survei komparatif lintas satu waktu (*cross-sectional*) dengan perbandingan antar kelompok berdasarkan fase implementasi regulasi penugasan kepala sekolah (Zainuri, Subakti, Sutrisno, et al., 2024). Unit analisis utama adalah satuan pendidikan, dengan responden terdiri atas kepala sekolah dan guru sebagai aktor yang mengalami langsung konsekuensi implementasi kebijakan (Subakti, Utami, et al., 2022). Pembentukan kelompok pembandingan dilakukan secara operasional melalui kriteria administratif yang dapat diverifikasi, seperti tahun penugasan, jalur penyiapan/pelatihan, dan dasar regulasi yang tercantum pada dokumen penugasan. Mengingat periode implementasi kebijakan berpotensi tumpang tindih, pengelompokan dibuat transparan melalui aturan klasifikasi yang terdokumentasi serta dapat diaudit. Selain survei, penelitian juga memanfaatkan analisis dokumen regulasi dan dokumen teknis dinas/sekolah untuk memperkuat interpretasi serta memastikan ketepatan pengelompokan rezim regulasi.

Populasi penelitian mencakup seluruh satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur pada berbagai jenjang (PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan SLB) yang memiliki kepala sekolah definitif dan guru tetap. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified cluster sampling*, dengan strata ditetapkan berdasarkan kabupaten/kota dan jenjang sekolah untuk menjamin keterwakilan konteks wilayah dan layanan (Mubarak et al., 2024). Pada setiap strata, kluster sekolah dipilih secara acak proporsional, kemudian di setiap sekolah ditetapkan responden minimal satu kepala sekolah dan sejumlah guru sesuai ukuran sekolah. Jumlah guru per sekolah dapat ditetapkan dalam rentang operasional (misalnya 8–15 orang) agar estimasi agregat tingkat sekolah lebih stabil. Ukuran sampel keseluruhan ditentukan berdasarkan pertimbangan power statistik untuk analisis komparatif dan inferensial, terutama ketika memasukkan variabel kontrol seperti lokasi, jenjang, akreditasi, dan pengalaman kerja.

Variabel penelitian dikelompokkan menjadi variabel independen, dependen, dan kontrol untuk memastikan model analisis memiliki kejelasan kausal-operasional (Net et al., 2024). Variabel independen adalah implementasi regulasi

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

(X) yang diukur melalui dimensi pemahaman regulasi, kepatuhan prosedur, akses penyiapan/pelatihan, dukungan pembinaan, serta praktik penjaminan mutu. Variabel dependen meliputi kepemimpinan kepala sekolah (Y1), profesionalisme guru (Y2), dan kinerja guru (Y3) yang masing-masing dioperasionalkan melalui indikator yang relevan dengan teori kepemimpinan sekolah dan profesionalisme pendidikan (Triyono et al., 2023). Kepemimpinan kepala sekolah diukur melalui aspek manajerial dan pembelajaran, seperti perencanaan, pengorganisasian, supervisi akademik, coaching, penggunaan data, dan budaya kolaborasi. Profesionalisme dan kinerja guru diukur melalui indikator kompetensi, pengembangan berkelanjutan, refleksi kolaborasi, etika profesi, serta dimensi kinerja pembelajaran seperti perencanaan, pelaksanaan, asesmen, tindak lanjut, dan kontribusi terhadap pengembangan sekolah (Panggabean et al., 2021).

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan kuesioner skala Likert (1–5) yang disusun terpisah untuk responden kepala sekolah dan guru. Instrumen dirancang untuk menangkap persepsi dan pengalaman terhadap implementasi regulasi, praktik kepemimpinan, profesionalisme, dan kinerja, sehingga memungkinkan perbandingan lintas kelompok dan pengujian hubungan antarvariabel (Jaedun et al., 2024). Untuk meningkatkan ketepatan interpretasi, penelitian menambahkan wawancara semi-terstruktur secara selektif kepada sejumlah kepala sekolah dan/atau pengawas sebagai data penjelas atas temuan kuantitatif. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen regulasi, surat penugasan, bukti pelatihan/penyiapan, laporan penjaminan mutu, dokumen perencanaan sekolah, serta dokumen pembelajaran. Dokumen ini berfungsi memvalidasi klasifikasi rezim regulasi, memeriksa konsistensi antara persepsi responden dan bukti administratif, serta menguatkan argumentasi interpretatif. Dengan strategi tersebut, data yang diperoleh tidak hanya kaya secara numerik, tetapi juga memiliki dukungan evidensial untuk memperkuat klaim penelitian (Net et al., 2024).

Pengujian kualitas instrumen dilakukan melalui validitas isi, validitas konstruk, dan reliabilitas untuk memastikan keterandalan pengukuran. Validitas isi ditempuh melalui expert judgment agar indikator selaras dengan definisi operasional dan kerangka teoritis yang digunakan. Validitas empiris dan reliabilitas diuji melalui studi pendahuluan (*pilot test*) di luar sampel utama, menggunakan korelasi item total serta koefisien Cronbach's alpha sebagai ukuran konsistensi internal. Analisis faktor eksploratori dan/atau konfirmatori dapat digunakan untuk menguatkan validitas konstruk apabila ukuran sampel dan distribusi data memenuhi persyaratan. Aspek etika penelitian mencakup *informed consent*, kerahasiaan identitas responden dan sekolah, serta pembatasan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik. Mengingat topik kebijakan dapat bersifat sensitif, pelaporan dilakukan dengan anonimisasi serta penekanan pada pembelajaran sistemik alih-alih penilaian personal (Kholifah et al., 2022).

Analisis data dilakukan secara bertahap untuk memastikan ketepatan inferensi dan keterlacakan prosedur. Tahap awal mencakup analisis deskriptif guna memetakan profil responden, kecenderungan jawaban, serta variasi indikator antar kelompok implementasi regulasi. Tahap berikutnya adalah uji prasyarat statistik,

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

meliputi normalitas dan homogenitas, sebagai dasar pemilihan uji parametrik atau nonparametrik (Salehudin et al., 2023). Untuk menguji perbedaan antar kelompok rezim regulasi, digunakan ANOVA atau alternatif nonparametrik sesuai kondisi data, kemudian dilanjutkan uji lanjut (*post hoc*) bila diperlukan. Untuk menguji pengaruh implementasi regulasi terhadap Y1, Y2, dan Y3 serta menguji peran mediasi kepemimpinan kepala sekolah, digunakan regresi berganda dan prosedur pengujian mediasi yang relevan, dengan memasukkan variabel kontrol. Apabila ukuran sampel memadai, analisis lanjutan seperti SEM-PLS atau multigroup analysis dapat digunakan untuk menguji model mediasi dan perbedaan lintas kelompok secara lebih komprehensif, sedangkan data wawancara dianalisis secara tematik untuk menjelaskan mekanisme implementasi dan memperkaya interpretasi hasil kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menerapkan analisis dokumen kebijakan dalam perspektif ontologi, epistemology, aksiologi (O, E, A) untuk membaca arah dan implikasi regulasi penugasan kepala sekolah. Analisis dokumen dipilih karena fokus kajian berada pada teks regulasi sebagai artefak kebijakan yang memuat definisi, instrumen, dan orientasi nilai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengekstraksi asumsi teoretik yang melekat pada aturan formal sebelum melakukan pengujian empiris. Karena penelitian lapangan belum dilaksanakan, pembahasan diposisikan sebagai temuan awal (*preliminary findings*) yang bersumber dari dokumen regulasi dan laporan implementasi yang lazim muncul dalam manajemen sekolah. Dengan demikian, hasil bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk merumuskan variabel, indikator, dan hipotesis penelitian berikutnya.

Objek dokumen yang dianalisis mencakup tiga regulasi penugasan kepala sekolah yang mewakili perubahan rezim kebijakan 2018–2025. Selain regulasi utama, analisis juga mempertimbangkan dokumen turunan yang secara praktis mengoperasionalkan kebijakan, seperti pedoman teknis, surat penugasan, dan dokumen penjaminan mutu di tingkat daerah. Strategi ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan antara teks normatif dan bentuk implementatif yang tampak di sekolah. Setiap dokumen diperlakukan sebagai data kualitatif yang dianalisis melalui pembacaan sistematis terhadap definisi istilah, persyaratan, prosedur, serta mekanisme evaluasi. *Output* analisis diarahkan pada pemetaan unsur O, E, A dan penarikan proposisi dampak potensial terhadap kepemimpinan kepala sekolah serta profesi guru.

Prosedur analisis dokumen dilakukan melalui tiga tahap yang saling berurutan dan dapat direplikasi. Tahap pertama adalah identifikasi unit analisis pada dokumen, mencakup pasal, ayat, dan lampiran yang mengatur penyiapan, penugasan, masa tugas, pemberhentian, serta penjaminan mutu. Tahap kedua adalah pengodean tematik dengan kerangka O, E, A untuk menandai pernyataan yang merepresentasikan asumsi ontologis, perangkat epistemologis, dan orientasi aksiologis. Tahap ketiga adalah sintesis, yaitu menyatukan hasil pengodean menjadi matriks pemetaan yang menghubungkan unsur regulasi dengan konsekuensi

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

potensial pada praktik kepemimpinan dan profesionalisme guru. Untuk meningkatkan keterlacakan, peneliti menuliskan aturan pengodean dan contoh penempatan kutipan regulasi pada kategori O, E, A sebagai bagian dari audit trail analisis.

Dalam dimensi ontologis, regulasi dipahami sebagai mekanisme yang membentuk definisi formal tentang siapa yang layak menjadi kepala sekolah dan apa yang dianggap sebagai kompetensi esensial. Definisi tersebut tidak netral, karena sekaligus memosisikan sekolah sebagai jenis organisasi tertentu, baik sebagai unit birokrasi layanan publik maupun sebagai komunitas pembelajaran. Ontologi kebijakan juga tampak pada cara regulasi memaknai peran kepala sekolah, apakah dominan sebagai administrator, pemimpin pembelajaran, agen perubahan, atau aktor penjaminan mutu. Penetapan persyaratan, jalur penyiapan, dan ketentuan masa tugas membentuk batas-batas identitas profesional kepala sekolah dalam praktik. Dengan demikian, pembacaan ontologis diarahkan untuk mengidentifikasi “realitas sekolah” yang diandaikan regulasi serta implikasinya bagi distribusi peran kepala sekolah dan guru.

Dalam dimensi epistemologis, regulasi menetapkan cara pengetahuan tentang kelayakan dan kinerja diproduksi serta dinyatakan sah. Ketentuan tentang sertifikat, portofolio, hasil penilaian, laporan, dan bukti pelaksanaan program merupakan instrumen epistemik yang menentukan apa yang dapat diakui sebagai “kinerja” dan “mutu”. Ketika bukti kebijakan berorientasi pada dokumen yang dapat diverifikasi, sistem penilaian cenderung membentuk pengetahuan berbasis audit yang mengutamakan keterukuran administratif. Sebaliknya, aspek kualitas praktik kepemimpinan dan pembelajaran yang bersifat relasional sering kali sulit direpresentasikan dalam bukti dokumenter. Karena itu, pembacaan epistemologis digunakan untuk menilai potensi kesenjangan antara bukti formal yang diminta regulasi dan realitas praktik kepemimpinan serta pembelajaran yang berlangsung di sekolah.

Dalam dimensi aksiologis, regulasi mengusung nilai publik yang lazim, seperti mutu layanan, akuntabilitas, pemerataan, dan efisiensi tata kelola. Namun, implementasi nilai tersebut dapat memunculkan dilema ketika mekanisme akuntabilitas diterjemahkan menjadi kontrol administratif yang kuat. Dilema aksiologis muncul terutama pada ketegangan antara pembinaan dan sanksi, antara penguatan kapasitas dan kepatuhan dokumen, serta antara keadilan konteks dan standar yang seragam. Pada wilayah dengan kapasitas administratif tinggi, standar seragam dapat mempercepat perbaikan mutu, tetapi pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya dapat berisiko menjadi beban tambahan. Oleh sebab itu, analisis aksiologis dipakai untuk memastikan rekomendasi kebijakan dan desain penelitian tidak mengabaikan etika profesi, martabat kerja pendidik, dan prinsip keadilan layanan pendidikan.

Untuk menegaskan karakter studi kasus kebijakan, analisis dokumen dilengkapi dengan ilustrasi kontekstual implementasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ilustrasi ini bersifat anonim dan digunakan sebagai perangkat analitis, bukan sebagai bukti empiris final. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana teks regulasi berinteraksi dengan konteks yang berbeda dan menghasilkan konsekuensi

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

praktik yang beragam. Dengan cara ini, bab ini memosisikan konteks daerah sebagai faktor penjas yang perlu dikendalikan dalam penelitian kuantitatif dan diperdalam melalui data kualitatif. Dua ilustrasi dipilih untuk merepresentasikan spektrum konteks, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah rural/terpencil.

Ilustrasi A merepresentasikan konteks urban dengan akses pelatihan relatif baik, jejaring komunitas belajar guru lebih aktif, dan intensitas pengawasan administratif cenderung lebih tinggi. Dalam konteks ini, pemenuhan persyaratan penugasan kepala sekolah relatif lebih mudah karena dukungan sistem dan kapasitas administratif sekolah memadai. Namun, kondisi tersebut berpotensi mendorong kepemimpinan yang terjebak pada rutinitas kepatuhan, terutama bila indikator keberhasilan didominasi kelengkapan dokumen. Dampaknya, penjaminan mutu dapat berubah menjadi serangkaian aktivitas pelaporan yang kurang bertransformasi pada praktik pembelajaran. Karena itu, kepala sekolah memerlukan ruang kebijakan untuk menerjemahkan akuntabilitas menjadi coaching, supervisi akademik, dan pengembangan kapasitas guru yang bermakna.

Ilustrasi B merepresentasikan konteks rural/terpencil dengan keterbatasan akses, beban kerja tinggi, serta dukungan sumber daya dan administrasi yang tidak selalu sebanding dengan tuntutan standar. Pada konteks ini, mekanisme seleksi dan penugasan yang sangat berbasis dokumen berisiko menimbulkan ketimpangan karena kapasitas administratif tidak merata antar sekolah. Dilema aksiologis menjadi lebih tajam, sebab standar mutu tetap diperlukan tetapi harus disertai dukungan kapasitas agar tidak bergeser menjadi sanksi terselubung. Ketika dukungan pembinaan lemah, kepala sekolah dan guru cenderung mengalokasikan energi untuk memenuhi dokumen minimum, bukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ilustrasi ini menguatkan argumentasi bahwa desain penelitian perlu memasukkan variabel konteks dan dukungan sistem sebagai kontrol, serta membutuhkan data kualitatif untuk menafsirkan temuan kuantitatif secara adil.

Berdasarkan hasil pemetaan O, E, A, implikasi regulasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah dapat dibaca melalui tiga jalur analitis yang saling terkait. Jalur pertama adalah kapasitas, yaitu bagaimana regulasi mengatur penyiapan calon kepala sekolah melalui seleksi, pelatihan, dan sertifikasi yang akan memengaruhi kapabilitas manajerial dan kepemimpinan pembelajaran. Jalur kedua adalah akuntabilitas, yaitu bagaimana mekanisme masa tugas, evaluasi, perpanjangan, pemberhentian, serta penjaminan mutu membentuk perilaku kepemimpinan di sekolah. Jalur ketiga adalah dukungan sistem, yakni bagaimana dinas pendidikan, pengawas, dan program pembinaan mengaktifkan atau melemahkan dampak regulasi dalam praktik. Karena itu, indikator penelitian perlu mengukur bukan hanya pemahaman dan kepatuhan regulasi, melainkan juga kualitas penyiapan, pola evaluasi, serta intensitas dukungan pembinaan yang diterima sekolah.

Pengaruh kebijakan penugasan kepala sekolah terhadap profesionalisme dan kinerja guru diperkirakan bekerja terutama melalui kualitas kepemimpinan sekolah sebagai variabel perantara. Kepala sekolah yang efektif berpotensi menata beban kerja, memberi umpan balik pedagogis, mendorong kolaborasi, dan menjaga ruang inovasi pembelajaran, sehingga profesionalisme guru berkembang secara

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

berkelanjutan. Sebaliknya, kepemimpinan yang tertekan oleh tuntutan kepatuhan administratif cenderung mendorong overadministrasi yang mengurangi waktu guru untuk perencanaan, refleksi, dan pengembangan praktik. Dari perspektif epistemologi, sistem evaluasi yang terlalu berorientasi dokumen berisiko memproduksi pengetahuan kinerja yang bias, karena yang terlihat adalah yang terdokumentasi, bukan yang berdampak pada belajar siswa. Dari perspektif aksiologi, desain kebijakan dan desain penelitian perlu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan pembinaan, sehingga standar mutu berjalan bersama kepercayaan profesional dan keadilan konteks.

SIMPULAN

Perubahan regulasi penugasan kepala sekolah pada periode 2018–2025 membentuk dinamika kebijakan yang tidak semata administratif, melainkan turut menentukan orientasi kepemimpinan sekolah dan tata kelola mutu. Ketiga regulasi yang dikaji merepresentasikan pergeseran instrumen penyiapan, penugasan, evaluasi, dan penjaminan mutu yang berpotensi memengaruhi cara sekolah dipimpin dan dinilai. Dalam konteks Kalimantan Timur, keragaman geografis, sosial ekonomi, dan variasi jenjang layanan memperbesar kemungkinan terjadinya diferensiasi implementasi antarsatuan pendidikan. Karena itu, analisis kebijakan perlu melampaui kepatuhan prosedural dan menempatkan regulasi sebagai kerangka institusional yang memandu perilaku aktor sekolah. Kerangka tersebut pada akhirnya memengaruhi kualitas pembelajaran melalui praktik kepemimpinan dan iklim kerja profesional di sekolah.

Dari perspektif O, E, A pembacaan ontologis menunjukkan bahwa regulasi penugasan kepala sekolah secara implisit membentuk definisi “kepala sekolah yang layak” dan bagaimana sekolah dipahami sebagai organisasi. Penekanan persyaratan, jalur penyiapan, dan ketentuan masa tugas mengarahkan identitas peran kepala sekolah pada spektrum administrator, pemimpin pembelajaran, pemimpin transformasional, hingga aktor penjaminan mutu. Pada saat yang sama, definisi profesionalisme guru berisiko terdorong ke arah pemenuhan standar yang mudah ditangkap administrasi apabila ekosistem akuntabilitas terlalu dominan. Implikasi ontologis ini penting karena menentukan fokus kemampuan yang dikembangkan dan jenis praktik kepemimpinan yang diinsentifkan. Dengan demikian, ontologi kebijakan menjadi kunci untuk memahami mengapa perubahan regulasi dapat menghasilkan praktik kepemimpinan yang berbeda antar sekolah.

Secara epistemologis, regulasi menegaskan jenis bukti kelayakan dan kinerja yang dinyatakan sah melalui sertifikat, portofolio, laporan, dan perangkat penilaian yang dapat diverifikasi. Orientasi pembuktian yang dominan dokumen mendorong lahirnya “pengetahuan audit”, yakni mutu dan kinerja cenderung diwakili oleh apa yang dapat dilaporkan dan dibandingkan. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara bukti administratif dan kualitas praktik kepemimpinan/pembelajaran yang bersifat relasional serta kontekstual. Konsekuensinya, studi empiris yang hanya mengandalkan indikator administratif berisiko menghasilkan simpulan yang bias terhadap realitas sekolah. Oleh karena itu, desain metodologi yang menggabungkan survei kuantitatif dengan data penjelas

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

kualitatif dan dukungan analisis dokumen menjadi strategi yang lebih memadai untuk menjaga validitas interpretasi.

Secara aksiologis, regulasi membawa nilai peningkatan mutu dan akuntabilitas publik, tetapi implementasinya dapat memunculkan dilema antara pembinaan dan kontrol. Ilustrasi konteks urban dan rural/terpencil di Kalimantan Timur menegaskan bahwa standar yang seragam dapat bekerja berbeda ketika kapasitas administratif dan dukungan sistem tidak merata. Pada konteks dengan dukungan kuat, kebijakan relatif mudah dipenuhi namun berisiko menjerumuskan kepemimpinan pada kepatuhan simbolik apabila ukuran keberhasilan berpusat pada dokumen. Pada konteks keterbatasan akses, tuntutan dokumen dapat memperlebar ketimpangan dan memunculkan “ketidakadilan indikator” jika tidak disertai penguatan kapasitas. Dengan demikian, prinsip keadilan konteks dan etika akuntabilitas perlu menjadi kompas agar mutu tidak dipahami sebagai beban administratif, melainkan sebagai proses pembinaan yang berkeadaban.

Dengan demikian pemetaan temuan awal menegaskan bahwa dampak kebijakan terhadap profesionalisme dan kinerja guru cenderung bekerja tidak langsung melalui kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Regulasi memengaruhi kepemimpinan melalui jalur kapasitas (penyiapan dan pelatihan), jalur akuntabilitas (evaluasi, masa tugas, penjaminan mutu), dan jalur dukungan sistem (pembinaan dinas/pengawas). Jika jalur-jalur tersebut dikelola secara seimbang, kepala sekolah berpotensi menjadi penguat pembelajaran melalui supervisi akademik, coaching, dan pengembangan budaya kolaboratif, yang kemudian mendorong profesionalisme dan kinerja guru. Sebaliknya, jika akuntabilitas didominasi logika audit, maka risiko overadministrasi meningkat dan ruang inovasi pembelajaran menyempit. Oleh karena itu, rancangan penelitian yang mengukur implementasi regulasi, dukungan sistem, variabel konteks, serta menguji mediasi kepemimpinan menjadi dasar yang kuat untuk menghasilkan bukti ilmiah yang relevan bagi perbaikan kebijakan di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep, H., Widyastuti, A., Subakti, H., Hasibuan, F. A., Sartika, S. H., Ardiana, D. P. Y., Avicenna, A., Salim, N. A., Karwanto, K., & Kato, I. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Cendana, W., Shoreamanis, M., Gianistika, C., Iwan, I., Yuniwati, I., Sari, I. M., Marshanawiah, A., Yudhistira, D., Komalasari, D., & Syam, S. (2025). *Pembelajaran Holistik: Integrasi Meaningful, Joyful, Deep dan Mindful Learning*. Yayasan Kita Menulis.
- Efendi, M. Y., Salamun, S., Mahatmaharti, R. A. K., Arvianti, A., Suhartati, T., Subakti, H., Sari, A. C., Panjaitan, M. M. J., Sunawi, S., & Purwaningtyas, A. (2022). *Asas-Asas Pendidikan: Konsep dan Teori*. Yayasan Kita Menulis.
- Idham, J., SD, S. P., Pradina, D., & Faridah, J. (2025). *Labirin Ilmu Eksplorasi Filsafat*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

- Jaedun, A., Nurtanto, M., Mutohhari, F., Saputro, I. N., & Kholifah, N. (2024). Perceptions of vocational school students and teachers on the development of interpersonal skills towards Industry 5.0. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2375184>
- Kholifah, N., Kusumawaty, I., Nurtanto, M., Mutohhari, F., Isnantyo, F. D., & Subakti, H. (2022). Designing The Structural Model of Students' Entrepreneurial Personality in Vocational Education: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Technical Education and Training*, 14(3), 1–17. <https://doi.org/10.30880/jtet.2022.14.03.001>
- Kholifah, N., Majid, N. W. A., Subakti, H., Putri, G. E., Suyitno, & Zuhri, M. T. (2023). Contribution of Local Product Purchase Policy to Improvement of the 21st Century Learning. *WSEAS Transactions on Systems*, 22(March), 231–241. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.24>
- Kholifah, N., Nurtanto, M., Kassymova, G. K., & Subakti, H. (2024). Evidence of positive influence: soft skills competence and organizational culture on innovative work behavior Evidence of positive influence: soft skills competence and organizational culture on innovative work behavior. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, April. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i4.21018>
- Mubarak, M., Mukmin, M., Subakti, H., Ihsan, M., Rosita, R., Rosadi, K., Angranti, W., Rohman, T., Ika, I., & Taufik, M. (2024). *Implementasi Teknologi dalam Pendidikan Agama Islam di Era Society 5.0*. Yayasan Kita Menulis.
- Nashir, F. (2024). *Pengaruh Kepemimpinan dan Profesionalisme terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja Guru di Yayasan Telkom*. 2(2019), 45–53.
- Net, W. W. W. P., Marganingsih, A., Pelipa, E. D., Seran, E. Y., Tuah, A. E., Kholifah, N., & Subakti, H. (2024). Determining Green Entrepreneurial Innovation of Higher Education Students: SEM Analysis Approach. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(2), 158–166. <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.02.20>
- Ngaisah, N. C., * M., & Aulia, R. (2023). Perkembangan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v9i1.16890>
- Pakpahan, M., Amruddin, A., Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotin, M., Karwanto, K., Tasrim, I. W., & Kato, I. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Panggabean, S., Widyastuti, A., Damayanti, W. K., Nurtanto, M., Subakti, H., Chamidah, D., Sianipar, L. K., Ardiana, D. P. Y., Purba, F. J., & Cecep, H. (2021). *Konsep dan Strategi Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, A., Widyastuti, A., Soesana, A., Salamun, S., Suesilowati, S., Lestari, R., Purba, S., Soputra, D., Subakti, H., & Fauzi, A. (2022). *strategi pembelajaran (suatu Pengantar)*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, R. A., Simarmata, J., Subakti, H., Mukmin, M., Ferwati, W., Nurtanto, M.,

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

- Ritonga, M. W., Suleman, N., Anjarwati, F., & Ray, S. A. (2024). *Pendidikan Berbasis Platform Digital: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, S., Subakti, H., Kato, I., Astari, W., Sari, R. N., Sari, A. C., Mawati, A. T., Anzelina, D., Salamun, S., & Pramana, C. (2022). *Konsep Manajemen dalam Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhani, Y. R., Tanjung, R., Saputro, A. N. C., Utami, N. R., Purba, P. B., Purba, S., Kato, I., Gumelar, G. R., Cecep, H., & Darmawati, D. (2021). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Salamun, S., Subakti, H., Simarmata, N. I. P., Purwanti, E., Pratiwi, I. I., Pohan, M. M., Anwar, K., Zebua, A. M., Kunusa, W. R., & Tasrim, I. W. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Salehudin, M., Suparmi, S., Nurdaniati, N., Panggih, P., & Subakti, H. (2024). Pendampingan Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran Pada Program Sekolah Penggerak Kota Bontang. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v6i1.17-33>
- Salehudin, M., Zurqoni, Z., Robingatin, R., Syobah, S. N., Janah, F., Rorimpandey, W. H. F., & Subakti, H. (2023). Mobile Learning With Discord Application as Creative Teaching. *TEM Journal*, 12(3), 1697–1705. <https://doi.org/10.18421/TEM123-51>
- Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4), 52–63.
- Sitompul, R. S., Widyastuti, A., Pohan, M. M., Sari, M., Sari, I. N., Subakti, H., Salamun, S., Mulyani, S., Astuti, Y., & Astari, W. (2023). *Manajemen Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Subakti, H., Nurtanto, M., Butsiarah, B., Saputro, A. N. C., Adila, A. S. D., Chamidah, D., Patria, I., Mutmainnah, M., Asrul, B. E. W., & Marito, W. (2025). *Sekolah Masa Depan: Mengintegrasikan AI dan Pembelajaran Interaktif*. Yayasan Kita Menulis.
- Subakti, H., Simarmata, J., Yuniwati, I., Salamun, S., Nababan, E. B., Silitonga, B. N., Juliana, J., Susanti, S. S., Sianipar, L. K., & Sinta, S. (2022). *Esensi Pembelajaran Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Yayasan Kita Menulis.
- Subakti, H., Utami, N. R., Sulaeman, D., Sopotra, D., Hardiyanti, S. A., Avicenna, A., Panjaitan, M. M. J., Arianti, I., Susanti, S. S., & Chamidah, D. (2022). *Teori Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E., Yenni, Y., Rahmawati, I., Hana, K. F., Prasetio, A., Umara, A. F., Susiati, A., Hardono, J., Harizahayu, H., & Harianja, J. K. (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. yayasan kita menulis.

Wiwik Setiarini*, Muhammad Amir Masruhim

Studi Kasus Penerapan Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis: (Perbandingan Implementasi PERMENDIKBUD NO. 6/2018, PERMENDIKBUDRISTEK NO. 40/2021, dan PERMENDIKDASMEN NO. 7/2025 Terhadap Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Serta Profesionalisme Kinerja Guru di Provinsi Kalimantan Timur)

Suhelayanti, S., Al Haddar, G., Yurfiah, Y., Purwanti, E., Sari, M., Syamsiah, Z., Subakti, H., Juliana, J., Munthe, A. P., & Sastri, L. (2023). *Penilaian Pembelajaran MI/SD*. Yayasan Kita Menulis.

Triyono, M. B., Mutohhari, F., Kholifah, N., Nurtanto, M., Subakti, H., & Prasetya, K. H. (2023). Examining the Mediating-Moderating Role of Entrepreneurial Orientation and Digital Competence on Entrepreneurial Intention in Vocational Education. *Journal of Technical Education and Training*, 15(1), 116–127. <https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.01.011>

Umurohmi, U., Ramadhani, Y. R., Astuti, R. N., Purba, S., Masri, S., Astari, W., Kunusa, W. R., Lestari, I. W., Mukmin, M., & Subakti, H. (2024). *Pengantar Microteaching*. Yayasan Kita Menulis.

Utami, N. R., Subakti, H., Salamun, S., Suesilowati, S., Simarmata, J., Kuswandi, S., Ferwati, W., Arvianti, A., Fahmi, A. I., & Mahatmaharti, A. K. (2022). *Pengantar Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Wahyudin, W., & Anggaira, A. S. (2021). *Dasar-Dasar Filsafat Ilmu Refleksi Pemikiran Bagi Ilmu Pengetahuan*. Idea Press Yogyakarta.

Zainuri, H., Subakti, H., Suttrisno, S., Saftari, M., Sari, A. C., Simarmata, J., Silaban, P. S. M. J., Yuniwati, I., Riana, L. W., & Lotulung, C. V. (2024). *Desain Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.

Zainuri, H., Subakti, H., Tawakkal, M. I., Umurohmi, U., Saputro, A. N. C., Mukmin, M., Simarmata, J., Pratiwi, I. I., & Iwan, I. (2024). *Revolusi Kurikulum: Membangun Pondasi Pendidikan Abad ke-21*. Yayasan Kita Menulis.

Zamroni, M. (2022). *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. IRCiSoD.